

ABSTRAK

Tamara Adi Prawira (01656190001)

ANALISIS YURIDIS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) BAGI PEJABAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DERIVATIF DI ATAS TANAH SENGKETA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1393 K/PDT/2019)

(xiii + 144 halaman; 2 lampiran)

Penelitian tesis ini bertujuan untuk meneliti peran Pejabat BPN dan PPAT dalam pendaftaran tanah derivatif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang beriktikad baik, serta melihat bagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1393 K/PDT/2019. Pejabat BPN dan PPAT memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang pertanahan. Sehingga dalam menjalankan tugas dan jabatannya, keduanya harus mengacu pada prinsip AUPB (khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas pelayanan yang baik) agar terciptanya suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang berkepentingan dalam bidang pertanahan, khususnya pendaftaran tanah derivatif. Di mana pendaftaran tanah derivatif disebut juga dengan pemeliharaan data, yaitu pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan apabila terjadi perubahan data fisik atau data yuridis dari objek pendaftaran tanah yang telah didaftarkan. Dalam penelitian tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa sertifikat hak atas tanah tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (yang dalam hal ini adalah BPN). Oleh karena itu, salah satu pihak mengajukan gugatannya ke pengadilan untuk membuktikan siapa pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dan untuk mendapatkan sertifikat baru atas namanya. Melalui penelitian tesis ini, kita dapat mengetahui bahwa hakim menyelesaikan perkara ini dengan mengumpulkan bukti dan saksi, serta menerapkan aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk menentukan siapa pemilik hak atas tanah yang sebenarnya. Kesimpulannya, pemilik hak atas tanah yang beriktikad baik mendapatkan perlindungan hukum dalam hal kepemilikan hak atas tanahnya dan amar putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1393 K/PDT/2019 ini memuat kepastian hukum mengenai keabsahan sertifikat hak atas tanah dan pemilik hak atas tanah yang syah menurut hukum.

Referensi: 36 (1992-2019)

Kata Kunci: AUPB, Pejabat BPN dan PPAT, Pendaftaran Tanah Derivatif

ABSTRACT

Tamara Adi Prawira (01656190001)

JURIDICAL ANALYSIS OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE (AUPB) FOR THE NATIONAL LAND AGENCY OFFICERS (BPN OFFICERS) AND THE LAND DEED OFFICIAL (PPAT) IN THE IMPLEMENTATION OF DERIVATIVE LAND REGISTRATION ON DISPUTED LAND (Case Study: Supreme Court Decision Number 1393 K/PDT/2019)

(xiii + 144 pages; 2 attachments)

This thesis researched the role of the BPN Officers and PPAT, the role of derivative land registration to provide legal certainty to the holders of land rights, the legal protection for the landowner who has a good faith, and see how the judges' consideration and judgement in this Supreme Court Decision Number 1393 K/PDT/2019. Due to the important role of BPN Officers and PPAT in land sector, both must refer to the AUPB principles (especially legal certainty principle, accuracy principle, and good service principle) in their actions to create legal protection and legal certainty for people who have interests related to land registration, especially derivative land registration. Whereas derivative land registration is also known as data maintenance, namely the maintenance of land registration data which carries out in the event of a changes in physical data or juridical data from a land registration object that has been registered. In this thesis, the Writer used a legal research method to do the research. Furthermore, from the research, it is apparent that certificate was issued by the competent authority. Hence, one of the parties brings the case to the court to prove who is the real owner of the land and get a new certificate in his name which is valid according to the law. From this research, we may know the court resolved this issue by gathering evidences and witnesses as well as implementing the rule of the law based on Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulations Number 24 of 1997 about Land Registration to determine who is the right landowner. In conclusion, a landowner who has a good faith received the legal protection in terms of land ownership and the judges' decision in this Supreme Court Decision Number 1393 K/PDT/2019 contains legal certainty with regards to the validity of the a certificate and the rightful landowner according to the law.

References: 36 (1992-2019)

Keywords: AUPB, BPN Officers and PPAT, Derivative Land Registration